



Di Balik Topeng Penderitaan: Telaah Etis Teologis Atas Dramaturgi Pura-Pura Miskin

Andi Saputra¹, Yohanes Stefanus², Arwani Zebua³

Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way

Abstract

Received: 22 Maret 2026

Revised: 29 Maret 2026

Accepted: 6 April 2026

This study examines the phenomenon of “pretending to be poor” through an ethical-theological approach using dramaturgical theory from Erving Goffman. The focus lies on identity distortion, violations of honesty and love, and their implications for social justice and church diaconal practices. This research employs a qualitative library method with descriptive-interpretative and hermeneutical analysis. The findings reveal that this phenomenon reflects a rupture in human relationships with God, others, and self, and calls for the renewal of Christian ethics and diakonia grounded in integrity, verification, and holistic empowerment.

Keywords: *Social Dramaturgy; Christian Ethics; Hypocrisy; Diakonia; Social Justice; Integrity; Poverty; Social Theology.*

(*) Corresponding Author: andyddcc04@gmail.com

How to Cite: Saputra, A., Stefanus, Y., & Zebua, A. (2026). Di Balik Topeng Penderitaan: Telaah Etis Teologis Atas Dramaturgi Pura-Pura Miskin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(4.D), 215-227. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14034>

PENDAHULUAN

Fenomena pura-pura miskin merupakan gejala sosial yang semakin tampak dalam dinamika masyarakat kontemporer, terutama dalam ruang publik yang dipengaruhi oleh media digital dan budaya performatif. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual yang bersifat manipulatif, tetapi juga merefleksikan konstruksi sosial yang memungkinkan representasi kemiskinan dijadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dalam perkembangan masyarakat modern, identitas tidak lagi dipahami sebagai realitas yang stabil, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipentaskan dalam interaksi sosial, sehingga penderitaan tidak lagi dipahami sebagai realitas eksistensial manusia yang perlu ditolong, melainkan sebagai peran yang dipentaskan demi kepentingan pragmatis (Budi and Ula, 2024). Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep dramaturgi yang menekankan bahwa individu cenderung memainkan peran tertentu dalam interaksi sosial untuk membentuk kesan tertentu di hadapan publik.

Kerangka ini memperoleh legitimasi teoritis melalui pemikiran Erving Goffman yang memahami kehidupan sosial sebagai panggung sandiwara, di mana individu memainkan peran tertentu untuk membentuk persepsi audiens. Praktik pura-pura miskin dapat dipahami sebagai bentuk dramaturgi sosial yang memanfaatkan simbol-simbol kemiskinan untuk membangun citra diri yang strategis. Representasi kemiskinan tidak lagi berakar pada kondisi objektif, melainkan pada kemampuan untuk mengelola kesan melalui atribut visual, narasi, dan ekspresi emosional (Goffman, 2023). Situasi ini menunjukkan adanya

pergeseran makna kemiskinan dari realitas struktural menuju komoditas simbolik yang dapat dipertukarkan dalam relasi sosial. Transformasi tersebut diperkuat oleh perkembangan media digital yang memungkinkan reproduksi citra secara masif dan cepat, sehingga batas antara realitas dan representasi menjadi semakin kabur. Fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap struktur kepercayaan sosial. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam relasi antar individu maupun dalam sistem distribusi bantuan sosial. Ketika praktik manipulatif semakin meluas, kepercayaan publik mengalami erosi karena meningkatnya kecurigaan terhadap keaslian kondisi seseorang (Saidah and Muhid, 2021). Bauman menggambarkan masyarakat modern sebagai ruang yang ditandai oleh ketidakpastian dan fluiditas nilai, di mana relasi sosial menjadi rapuh dan mudah terfragmentasi (Bauman, 2007). Dalam situasi demikian, tindakan yang memanfaatkan empati publik berpotensi memperdalam krisis kepercayaan, sehingga solidaritas sosial kehilangan basis moralnya.

Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, praktik pura-pura miskin tidak dapat dilepaskan dari realitas ketimpangan yang masih menjadi persoalan global. Ketimpangan distribusi sumber daya menciptakan kondisi di mana sebagian individu berada dalam situasi rentan, sehingga mendorong pencarian alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sen menjelaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Ketika akses terhadap sumber daya terbatas, muncul kecenderungan untuk memanfaatkan celah dalam sistem sosial, termasuk melalui manipulasi identitas (Hamilton, 2019). Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai penyimpangan moral individu, tetapi sebagai bagian dari dinamika struktural yang lebih luas.

Dalam perspektif etika Kristen, kejujuran dan kasih merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan. Praktik pura-pura miskin bertentangan dengan nilai kejujuran karena melibatkan konstruksi identitas yang tidak sesuai dengan realitas. Aquinas mengemukakan bahwa kejujuran merupakan kebajikan moral yang mengatur relasi manusia dengan kebenaran, baik dalam perkataan maupun dalam representasi diri. Ketika representasi tersebut dimanipulasi, tindakan tersebut mencerminkan deformasi moral yang merusak integritas pribadi (Whidden, 2016). Di sisi lain, praktik ini juga melanggar prinsip kasih yang menjadi inti ajaran Kristen. Kasih tidak hanya berkaitan dengan pemberian, tetapi juga dengan kejujuran dan penghormatan terhadap martabat sesama. Aruan mengutip Nygren memahami kasih agape sebagai tindakan yang bebas dari kepentingan diri dan berorientasi pada kebaikan orang lain (Aruan, 2016). Manipulasi empati dalam praktik pura-pura miskin menunjukkan adanya distorsi terhadap makna kasih, di mana relasi sosial dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi ini menciptakan relasi yang tidak setara dan merusak kepercayaan yang menjadi dasar solidaritas.

Implikasi lebih lanjut dari fenomena ini tampak dalam distorsi distribusi bantuan sosial. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan yang autentik berisiko dialihkan kepada pihak yang tidak berhak. Rawls mengemukakan bahwa keadilan distributif mengharuskan adanya prioritas bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Ketika distribusi bantuan dipengaruhi oleh representasi yang manipulatif, prinsip keadilan tersebut

tidak lagi terpenuhi. Kelompok miskin yang sesungguhnya justru berpotensi terpinggirkan karena keterbatasan dalam mengakses ruang representasi sosial (Rawls, 2017).

Dalam dimensi teologis yang lebih mendalam, fenomena pura-pura miskin dapat dipahami sebagai manifestasi dari kerusakan relasi manusia. Dosa dalam tradisi Kristen tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi sebagai keterputusan relasi dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Augustine of Hippo menggambarkan dosa sebagai ketidakteraturan cinta (*ordo amoris*), di mana manusia mengarahkan kasihnya kepada hal yang tidak semestinya. Praktik manipulatif mencerminkan orientasi diri yang terdistorsi, di mana kepentingan pribadi ditempatkan di atas kebenaran dan kasih (Hunter, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena pura-pura miskin bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga persoalan teologis yang menyentuh inti keberadaan manusia. Disintegrasi antara identitas batin dan penampilan lahiriah menciptakan ketegangan eksistensial yang berdampak pada kehidupan spiritual. Tillich memahami dosa sebagai keterasingan yang mencakup keterpisahan manusia dari dirinya sendiri dan dari Allah (Barlow, 2019). Dalam keadaan tersebut, manusia kehilangan keutuhan dirinya karena hidup dalam kepalsuan yang terus-menerus dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian etis-teologis terhadap fenomena pura-pura miskin menjadi relevan dan mendesak. Fenomena ini memperlihatkan keterkaitan antara dinamika sosial, struktur ekonomi, dan kondisi spiritual manusia. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami kompleksitas persoalan serta merumuskan respons yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menggali makna etis dan teologis dari fenomena tersebut, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan etika Kristen dan praktik diakonia yang lebih kontekstual dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (Sirait and Pandie, 2025), (*library research*) yang berfokus pada analisis etis-teologis terhadap fenomena “pura-pura miskin” dalam perspektif dramaturgi sosial dan etika Kristen. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan konstruksi moral di balik suatu fenomena sosial, bukan untuk mengukur variabel secara kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi teks-teks klasik dan kontemporer dalam bidang teologi, etika Kristen, dan ilmu sosial, khususnya karya Erving Goffman mengenai dramaturgi sosial, serta pemikiran teolog seperti Augustine of Hippo, Thomas Aquinas, dan Dietrich Bonhoeffer. Data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku referensi, serta laporan sosial yang relevan dengan fenomena manipulasi identitas kemiskinan dan praktik diakonia gereja.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara menelaah, mengklasifikasi, dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis (Imbing and Pandie, 2021). Peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti dramaturgi, kemunafikan, kejujuran, kasih, dosa struktural, serta

diakonia, untuk kemudian dianalisis dalam kerangka integratif antara ilmu sosial dan teologi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-interpretatif dan pendekatan hermeneutik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena “pura-pura miskin” sebagai realitas sosial yang memiliki dimensi performatif. Selanjutnya, pendekatan interpretatif dan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna etis dan teologis dari fenomena tersebut berdasarkan prinsip-prinsip etika Kristen dan teks-teks Alkitab. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi dan teologi moral.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari disiplin ilmu yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Selain itu, konsistensi argumentasi dijaga melalui penggunaan kerangka teoritis yang jelas dan relevan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang kritis, sistematis, dan teologis terhadap fenomena yang dikaji, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan etika Kristen dan praktik diakonia gereja dalam konteks sosial kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dramaturgi dalam Perspektif Sosial dan Teologis

Pendekatan dramaturgi diperkenalkan oleh Erving Goffman menyediakan kerangka analitis yang tajam untuk memahami praktik sosial sebagai suatu bentuk pertunjukan simbolik. Dalam karya klasiknya, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Goffman menguraikan bahwa interaksi sosial berlangsung melalui mekanisme “*front stage*” dan “*back stage*”, di mana individu mengonstruksi citra diri tertentu di hadapan audiens sosial guna memperoleh legitimasi dan penerimaan. Kehidupan sosial, dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari dimensi performatif yang melibatkan pengelolaan kesan (*impression management*). Setiap tindakan, ekspresi, maupun simbol yang ditampilkan mengandung muatan strategis yang diarahkan pada pembentukan persepsi orang lain (Goffman, nd).

Kerangka ini memberikan landasan konseptual untuk memahami fenomena dramaturgi pura-pura miskin sebagai suatu bentuk konstruksi identitas yang disengaja. Representasi kemiskinan tidak lagi dipahami sebagai kondisi objektif semata, melainkan sebagai hasil rekayasa simbolik yang dirancang untuk menghasilkan efek emosional tertentu pada audiens (Agoestina, 2019). Pakaian lusuh, gestur tubuh yang lemah, serta narasi penderitaan menjadi bagian dari perangkat simbolik yang dipentaskan secara sadar. Dalam terminologi Goffman, situasi tersebut mencerminkan optimalisasi wilayah *front stage*, di mana aktor sosial berupaya mempertahankan definisi situasi yang menguntungkan dirinya (Smith, 2016). Praktik demikian mengindikasikan adanya jarak antara realitas faktual dan realitas yang dipresentasikan, sehingga identitas yang tampil bersifat artifisial dan manipulatif. Konstruksi identitas semacam ini tidak berhenti pada dimensi sosiologis, melainkan mengandung implikasi etis dan teologis yang mendalam.

Dalam perspektif teologi Kristen, relasi antara identitas batin dan penampilan lahiriah memiliki signifikansi moral yang fundamental.

Ketidaksesuaian antara keduanya dipahami sebagai bentuk disintegrasi eksistensial yang mencerminkan keretakan relasi manusia dengan kebenaran ilahi. Augustine of Hippo menegaskan bahwa kebenaran diri terletak pada keselarasan antara interioritas manusia dan orientasinya kepada Allah sebagai sumber kebenaran. Ketika ekspresi lahiriah tidak lagi mencerminkan kondisi batin yang autentik, maka terjadi penyimpangan dari tatanan moral yang seharusnya (Hunter nd). Gagasan mengenai integritas sebagai kesatuan antara batin dan lahir juga dikembangkan dalam pemikiran Thomas Aquinas. Dalam kerangka etika kebajikan, Aquinas menempatkan kejujuran (*veracitas*) sebagai salah satu kebajikan moral yang berkaitan langsung dengan kebenaran dalam komunikasi dan representasi diri. Kebajikan ini mengandaikan bahwa apa yang ditampilkan seseorang harus selaras dengan realitas dirinya. Ketika representasi diri dimanipulasi demi keuntungan tertentu, tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merusak struktur kebajikan dalam diri pelaku (Theron, 2003). Dengan demikian, praktik pura-pura miskin dapat dipahami sebagai bentuk deformasi moral yang berakar pada kegagalan dalam menghidupi kebajikan kejujuran.

Ketidaksesuaian antara identitas batin dan penampilan lahiriah juga berkaitan erat dengan konsep kemunafikan (*hypocrisy*) dalam tradisi etika Kristen. Istilah ini memiliki akar dalam bahasa Yunani *hypokrisis*, yang merujuk pada tindakan berpura-pura atau memainkan peran tertentu di atas panggung. Secara historis, konsep ini telah digunakan untuk mengkritik perilaku religius yang bersifat eksternalistik tanpa didukung oleh transformasi batin yang sejati. Calvin mengkritik keras kemunafikan sebagai bentuk kesalehan palsu yang hanya berorientasi pada penilaian manusia, bukan pada kebenaran di hadapan Allah. Dalam kerangka ini, kemunafikan bukan sekadar ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan, melainkan sebuah kondisi spiritual di mana identitas diri dibangun di atas ilusi (Simon, 2021).

Dimensi kritik terhadap kemunafikan juga tampak dalam pemikiran Bonhoeffer yang menyoroti bahaya “anugerah murah” (*cheap grace*) dalam kehidupan iman. Bonhoeffer mengingatkan bahwa iman yang tidak diiringi oleh keaslian hidup hanya akan melahirkan bentuk-bentuk religiositas yang dangkal dan manipulatif. Dalam kaitannya dengan fenomena pura-pura miskin, konsep ini mengungkap bahwa manipulasi identitas bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menghayati iman secara autentik. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara pengakuan iman dan praktik hidup sehari-hari, sehingga integritas moral menjadi terfragmentasi (Bonhoeffer, 2021). Analisis teologis terhadap kemunafikan juga dapat diperkaya melalui pendekatan etika relasional. Stanley Hauerwas menekankan bahwa identitas moral seseorang dibentuk dalam relasi komunitas yang berakar pada narasi iman (Hauerwas, 2010). Ketika individu memilih untuk membangun identitas yang tidak autentik, relasi tersebut mengalami distorsi karena didasarkan pada representasi yang tidak benar. Dalam situasi demikian, kepercayaan sebagai fondasi relasi sosial menjadi rapuh, sehingga praktik manipulatif tidak hanya merugikan individu lain, tetapi juga merusak jaringan sosial secara keseluruhan.

Keterkaitan antara dramaturgi sosial dan kemunafikan teologis mengarah pada pemahaman bahwa tindakan pura-pura miskin merupakan bentuk

performativitas yang bermuatan etis negatif. Praktik ini memperlihatkan bagaimana mekanisme sosial yang dijelaskan oleh Goffman dapat berinteraksi dengan dimensi moral yang lebih dalam. Pengelolaan kesan yang semula bersifat netral dalam analisis sosiologis berubah menjadi problematis ketika digunakan untuk memanipulasi empati dan solidaritas (Smith, nd). Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi bertahan hidup, melainkan sebagai tindakan yang mengandung konsekuensi moral yang serius.

Telaah Etika Kristen terhadap Pura-Pura Miskin

Praktik pura-pura miskin menghadirkan problem etis yang serius apabila ditinjau melalui kerangka etika Kristen normatif. Salah satu dasar penilaiannya terletak pada prinsip kejujuran yang memiliki posisi sentral dalam ajaran Alkitab, khususnya sebagaimana termuat dalam Efesus 4:25. Teks tersebut menegaskan imperatif moral untuk “menanggalkan dusta” dan “berkata benar seorang kepada yang lain”, yang menunjukkan bahwa kejujuran bukan sekadar anjuran moral, melainkan perintah yang mengikat dalam kehidupan komunitas iman. Kejujuran di sini tidak hanya dipahami dalam arti verbal, tetapi juga mencakup kesesuaian antara identitas diri, tindakan, dan representasi sosial.

Dalam perspektif teologi moral, kejujuran berkaitan erat dengan integritas sebagai kesatuan ontologis antara batin dan ekspresi lahiriah. Aquinas mengembangkan konsep *veracitas* sebagai kebajikan yang mengatur relasi manusia dengan kebenaran dalam komunikasi dan penampilan diri. Kebajikan ini mengharuskan setiap individu untuk merepresentasikan dirinya secara autentik sesuai dengan realitas yang ada. Ketika seseorang secara sengaja membangun citra diri yang tidak sesuai dengan kondisi factual seperti dalam praktik pura-pura miskin tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebajikan kejujuran (Whidden, nd). Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada relasi interpersonal, tetapi juga mencerminkan kerusakan dalam struktur moral internal pelaku. Dari sudut pandang etika biblis, kejujuran memiliki dimensi relasional yang kuat. Komunitas Kristen dipahami sebagai tubuh yang saling terhubung, sehingga kebohongan yang dilakukan oleh satu individu memiliki implikasi terhadap keseluruhan komunitas. Stott menegaskan bahwa kejujuran merupakan fondasi bagi kehidupan komunitas yang sehat, karena tanpa kebenaran, relasi sosial akan dibangun di atas ilusi dan ketidakpercayaan (Stott, 2005). Oleh sebab itu, tindakan manipulatif yang mengeksploitasi empati publik tidak hanya merupakan pelanggaran individu, tetapi juga ancaman terhadap kohesi sosial dalam komunitas.

Manipulasi empati dalam praktik pura-pura miskin menunjukkan adanya distorsi terhadap makna kasih. Empati yang seharusnya menjadi respons spontan terhadap penderitaan nyata justru dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan. Hal ini menciptakan relasi yang asimetris dan eksploitatif, di mana pihak yang memberi berada dalam posisi yang dimanipulasi secara emosional. Volf menekankan bahwa kasih Kristen selalu berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat orang lain dan keterbukaan terhadap kebenaran. Ketika relasi dibangun di atas kepalsuan, martabat tersebut tidak lagi dihormati, melainkan direduksi menjadi sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Distorsi terhadap kasih juga memiliki implikasi sosial yang luas. Ketika praktik

manipulatif semacam ini menjadi semakin umum, kepercayaan publik terhadap tindakan kasih dapat mengalami erosi. Individu atau komunitas yang membutuhkan pertolongan secara autentik berisiko tidak lagi mendapatkan respons yang layak karena meningkatnya kecurigaan (Susanta, 2020). Dengan demikian, tindakan pura-pura miskin tidak hanya merusak relasi antara pelaku dan korban langsung, tetapi juga berdampak pada struktur solidaritas sosial secara keseluruhan.

Penilaian etis terhadap fenomena ini menjadi semakin jelas ketika dilihat melalui kerangka etika deontologis dalam tradisi Kristen. Etika deontologis menekankan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip atau kewajiban moral, bukan semata-mata oleh konsekuensi yang dihasilkan. Dalam tradisi filsafat moral, pendekatan ini sering dikaitkan dengan pemikiran Kant yang menegaskan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip universal yang dapat diterapkan secara konsisten⁵. Dalam kerangka Kristen, prinsip ini diintegrasikan dengan perintah ilahi yang menuntut ketaatan terhadap kehendak Allah. Dalam perspektif tersebut, tindakan pura-pura miskin dinilai salah secara intrinsik karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kasih, terlepas dari hasil yang mungkin diperoleh. Argumentasi bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan karena menghasilkan keuntungan ekonomi tidak dapat diterima dalam kerangka deontologis.

Dimensi Dosa Struktural dan Individual

Fenomena pura-pura miskin tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan moral individual, melainkan harus dipahami dalam keterkaitannya dengan struktur sosial yang memungkinkan dan bahkan memfasilitasi kemunculannya. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan dalam etika sosial Kristen yang melihat bahwa tindakan manusia selalu berada dalam jaringan relasi yang kompleks, mencakup dimensi ekonomi, budaya, dan institusional. Dengan demikian, analisis terhadap praktik tersebut menuntut perhatian tidak hanya pada intensi personal, tetapi juga pada kondisi sosial yang membentuk dan mempengaruhi pilihan moral individu.

Dalam kerangka teologis, pemahaman mengenai dosa telah mengalami perluasan dari sekadar tindakan individual menuju realitas yang bersifat struktural. Niebuhr menegaskan bahwa dosa tidak hanya beroperasi dalam ranah pribadi, tetapi juga terwujud dalam sistem sosial yang tidak adil dan cenderung melanggengkan ketimpangan (Niebuhr, 2022). Struktur sosial yang tidak setara dapat menciptakan kondisi di mana individu terdorong untuk mengadopsi strategi bertahan hidup yang problematis secara moral (Pandie, 2022). Dalam situasi demikian, praktik pura-pura miskin dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan struktural yang membatasi akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan hidup yang layak.

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap munculnya fenomena ini. Distribusi sumber daya yang tidak merata menciptakan jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, sehingga sebagian individu berada dalam kondisi rentan yang mendorong pencarian alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sen mengemukakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi

juga keterbatasan kemampuan (*capabilities*) untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Ketika kemampuan tersebut terhambat oleh struktur sosial yang tidak adil, individu dapat terdorong untuk memanfaatkan celah-celah dalam sistem sosial, termasuk melalui manipulasi identitas, guna memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan (Peacock, 2010).

Di samping faktor ekonomi, dinamika budaya kontemporer juga memainkan peran penting dalam memperkuat praktik tersebut. Budaya instan yang berkembang dalam masyarakat modern cenderung mengedepankan hasil cepat tanpa mempertimbangkan proses yang etis. Nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan integritas sering kali terpinggirkan oleh orientasi pragmatis yang berfokus pada keuntungan jangka pendek (Halawa and Pandie, 2025). Zygmunt Bauman menggambarkan kondisi ini sebagai “modernitas cair”, di mana norma dan nilai menjadi fleksibel serta mudah dinegosiasikan sesuai kepentingan individu. Dalam situasi demikian, batas antara tindakan yang dapat diterima dan yang tidak menjadi semakin kabur, sehingga praktik manipulatif seperti pura-pura miskin dapat memperoleh legitimasi implisit dalam kesadaran sosial. Budaya instan juga berkaitan erat dengan perkembangan media digital yang memperluas ruang bagi performativitas sosial. Representasi diri dapat dikonstruksi dan disebarluaskan dengan mudah, sehingga memungkinkan reproduksi narasi penderitaan yang tidak selalu mencerminkan realitas. Dalam lingkungan semacam ini, empati publik menjadi komoditas yang dapat dimobilisasi melalui strategi komunikasi tertentu. Hal ini memperkuat kecenderungan untuk memanfaatkan simbol-simbol kemiskinan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, sekaligus memperdalam krisis kepercayaan dalam relasi sosial.

Pemahaman teologis mengenai dosa sebagai relasi yang rusak memberikan kerangka yang komprehensif untuk menafsirkan fenomena ini. Dosa tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum ilahi, tetapi sebagai keretakan dalam relasi fundamental manusia dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Augustine of Hippo menggambarkan dosa sebagai kondisi di mana cinta manusia terarah secara keliru (*ordo amoris*), sehingga manusia lebih mengutamakan kepentingan diri daripada kebenaran ilahi (Hunter, nd). Relasi dengan Allah juga mengalami distorsi karena tindakan tersebut didasarkan pada ketidakbenaran. Dalam tradisi Kristen, Allah dipahami sebagai sumber kebenaran, sehingga setiap bentuk kebohongan mencerminkan keterpisahan dari-Nya. Barth menekankan bahwa dosa merupakan penolakan manusia terhadap anugerah Allah yang memanggilnya untuk hidup dalam kebenaran (Nassa, 2020). Ketika individu memilih untuk membangun identitas yang tidak autentik, pilihan tersebut menunjukkan adanya penolakan terhadap panggilan tersebut, sehingga relasi dengan Allah menjadi terfragmentasi.

Dampak Terhadap Keadilan Sosial Dan Praktik Diakonia

Fenomena “pura-pura miskin” menghadirkan konsekuensi serius terhadap tata kelola distribusi bantuan sosial, terutama dalam kaitannya dengan keadilan distributif dan integritas praktik diakonia. Distorsi dalam distribusi bantuan muncul ketika sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi individu atau kelompok yang benar-benar membutuhkan justru dialihkan kepada pihak yang memanipulasi kondisi sosialnya. Dalam perspektif etika sosial, kondisi ini

mencerminkan kegagalan dalam menjaga prinsip keadilan sebagai fondasi distribusi yang adil dan proporsional. Konsep keadilan distributif telah lama menjadi perhatian dalam filsafat moral dan teologi sosial. Rawls mengemukakan bahwa distribusi sumber daya dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip ini mengandaikan adanya mekanisme yang mampu mengidentifikasi secara akurat siapa yang termasuk dalam kategori rentan. Ketika praktik manipulatif seperti pura-pura miskin mengintervensi proses tersebut, mekanisme distribusi menjadi terganggu, sehingga tujuan keadilan tidak tercapai. Bantuan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan justru kehilangan efektivitasnya karena salah sasaran (Rawls, nd).

Distorsi tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi distribusi, tetapi juga pada legitimasi moral dari sistem bantuan sosial itu sendiri. Sen menekankan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi barang, tetapi juga dengan kemampuan nyata individu untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Ketika akses tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak melalui manipulasi, individu yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Peacock, nd). Dengan demikian, praktik pura-pura miskin berkontribusi pada reproduksi ketidakadilan struktural yang semakin memperlebar kesenjangan sosial.

Salah satu implikasi paling nyata dari distorsi ini adalah terpinggirkannya kelompok rentan yang autentik. Individu atau komunitas yang hidup dalam kondisi kemiskinan nyata sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menampilkan penderitaan secara performatif atau strategis. Keterbatasan akses terhadap media, pendidikan, dan jaringan sosial membuat suara mereka kurang terdengar dalam ruang publik. Gutiérrez dalam teologi pembebasan menegaskan bahwa orang miskin bukan hanya objek belas kasihan, tetapi subjek yang memiliki martabat dan hak untuk diperjuangkan. Ketika perhatian sosial justru dialihkan kepada representasi kemiskinan yang bersifat artifisial, keberadaan kelompok miskin yang sesungguhnya menjadi semakin tidak terlihat (Purwanto, 2024).

Implikasi Terhadap Praktik Diakonia Gereja

Praktik pura-pura miskin menuntut gereja untuk merefleksikan kembali paradigma diakonia yang dijalankan, terutama dalam kaitannya dengan integritas, efektivitas, dan ketepatan sasaran pelayanan sosial. Diakonia tidak dapat dipahami sekadar sebagai aktivitas karitatif yang bersifat spontan, melainkan sebagai praksis teologis yang menuntut pertanggungjawaban moral dan kebijaksanaan pastoral. Dalam situasi di mana manipulasi identitas sosial semakin kompleks, gereja perlu mengembangkan model diakonia yang tidak hanya berlandaskan belas kasih, tetapi juga ditopang oleh mekanisme verifikasi yang memadai serta orientasi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kebutuhan akan diakonia berbasis verifikasi muncul dari realitas bahwa distribusi bantuan yang tidak terkontrol berpotensi disalahgunakan. Verifikasi dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk kecurigaan yang berlebihan, melainkan sebagai upaya menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam pelayanan tanggung jawab sosial gereja harus dijalankan dengan integritas yang tinggi, termasuk dalam memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara

tepat guna. Proses verifikasi dapat mencakup pengenalan konteks sosial penerima, keterlibatan komunitas lokal, serta penggunaan data yang akurat untuk menilai tingkat kebutuhan. Dengan demikian, diakonia tidak hanya menjadi ekspresi kasih, tetapi juga wujud keadilan yang konkret.

Di samping verifikasi, orientasi pemberdayaan menjadi elemen kunci dalam pembaruan praktik diakonia. Pendekatan yang hanya berfokus pada pemberian bantuan material berisiko menciptakan ketergantungan, sehingga tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. Pelayanan Kristen yang autentik harus mengarah pada transformasi holistik, yang mencakup pemulihan relasi manusia dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, pemberdayaan dipahami sebagai proses yang memungkinkan individu dan komunitas untuk mengembangkan kapasitasnya, sehingga mampu keluar dari kondisi kerentanan secara mandiri. Dengan demikian, diakonia tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas jangka panjang yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang lebih mendalam.

Keterpaduan antara verifikasi dan pemberdayaan mengarah pada kebutuhan akan pendekatan holistik dalam pelayanan gereja. Pendekatan ini mengandaikan bahwa kebutuhan manusia tidak dapat direduksi pada dimensi material semata, melainkan mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis. Dalam kerangka ini, diakonia tidak berhenti pada tindakan memberi, tetapi berlanjut pada proses membina, mendampingi, dan memulihkan. Pendekatan holistik juga menuntut adanya relasi yang lebih mendalam antara gereja dan komunitas yang dilayani. Relasi tersebut memungkinkan gereja untuk memahami secara lebih akurat kondisi nyata yang dihadapi oleh individu atau kelompok tertentu, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih relevan dan kontekstual. Dengan demikian, diakonia menjadi bagian dari kesaksian iman yang menyeluruh, bukan sekadar aktivitas tambahan dalam kehidupan gereja.

Dalam menjalankan diakonia yang berbasis verifikasi dan pemberdayaan, gereja juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menghidupi kebijaksanaan tanpa kehilangan belas kasih. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Yesus sebagaimana tertulis dalam Matius 10:16, yang menyerukan agar para murid “cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati”. Teks ini mengandung ketegangan kreatif antara kecerdikan dan ketulusan, yang keduanya harus dihidupi secara bersamaan dalam praktik pelayanan. Kecerdikan mengarah pada kemampuan untuk membaca situasi secara kritis dan menghindari penyalahgunaan, sedangkan ketulusan mencerminkan hati yang penuh kasih dan keterbukaan terhadap penderitaan sesama. Refleksi teologis terhadap prinsip ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukanlah sikap pragmatis yang mengabaikan nilai moral, melainkan kemampuan untuk menerapkan nilai tersebut secara tepat dalam situasi konkret. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk mengembangkan discernment yang mampu membedakan kebutuhan yang autentik dari representasi yang manipulatif, tanpa kehilangan komitmen terhadap kasih sebagai inti dari iman Kristen.

Rekonstruksi Etika Autentisitas Dalam Iman Kristen

Integritas dalam tradisi etika Kristen menempati posisi yang fundamental karena berkaitan langsung dengan kesatuan antara iman yang diakui dan tindakan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Integritas tidak sekadar dipahami sebagai konsistensi moral secara umum, melainkan sebagai keutuhan eksistensial yang menghubungkan dimensi batiniah dengan praksis konkret. Dalam kerangka ini, iman tidak berhenti pada ranah kognitif atau afektif, tetapi menuntut manifestasi nyata dalam tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Injil. Pemisahan antara iman dan tindakan akan menghasilkan kehidupan religius yang terfragmentasi, di mana pengakuan iman kehilangan daya transformasinya dalam realitas sosial.

Pemahaman mengenai integritas sebagai kesatuan antara iman dan tindakan telah lama menjadi perhatian dalam teologi Kristen. Iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan dipandang sebagai iman yang kosong, karena tidak mencerminkan relasi yang hidup dengan Allah. Integritas tersebut berkaitan erat dengan tuntutan spiritualitas Kristen akan kejujuran eksistensial di hadapan Allah. Kejujuran eksistensial mengacu pada keberanian untuk menghadirkan diri secara apa adanya di hadapan Allah, tanpa topeng atau manipulasi identitas. Dalam tradisi biblis, relasi dengan Allah selalu diasosiasikan dengan kebenaran, karena Allah sendiri dipahami sebagai sumber segala kebenaran. Oleh sebab itu, setiap bentuk kepalsuan dalam diri manusia merupakan hambatan dalam relasi tersebut.

Keterkaitan antara integritas dan kejujuran eksistensial mengarah pada konsep autentisitas sebagai dasar relasi sosial yang adil dan penuh kasih. Autentisitas tidak hanya berkaitan dengan relasi individu dengan Allah, tetapi juga mempengaruhi kualitas hubungan dengan sesama. Relasi sosial yang dibangun di atas kepalsuan atau manipulasi akan menghasilkan ketidakpercayaan dan ketidakadilan, karena tidak didasarkan pada kebenaran. Sebaliknya, autentisitas memungkinkan terjadinya perjumpaan yang jujur dan setara antara individu, sehingga membuka ruang bagi terciptanya solidaritas yang sejati. Autentisitas individu berkontribusi pada pembentukan komunitas yang berintegritas, di mana relasi antaranggota didasarkan pada kejujuran dan saling percaya. Dalam komunitas semacam ini, kasih tidak menjadi sekadar retorika, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan konsisten.

KESIMPULAN

Fenomena “pura-pura miskin” mengungkap kompleksitas persoalan etis yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan spiritual. Praktik ini mencederai prinsip kejujuran dan kasih dalam etika Kristen, sekaligus merusak keadilan distributif dalam kehidupan sosial. Analisis teologis menunjukkan adanya disintegrasi antara iman dan tindakan, serta keretakan relasi manusia dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk merespons melalui pengembangan diakonia yang bijaksana, berbasis verifikasi, dan berorientasi pada pemberdayaan. Pendekatan holistik menjadi penting agar pelayanan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga membina dan memulihkan martabat manusia secara utuh. Integritas, kejujuran eksistensial, dan autentisitas menjadi fondasi utama dalam membangun relasi sosial yang adil dan penuh kasih. Dengan demikian, refleksi ini menegaskan urgensi pembaruan etika

Kristen yang mampu menjawab tantangan kontemporer secara kritis dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoestina, Eunike. "Model Pelayanan Misi Holistik Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Kaluteros: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* Volume 1 N (June 2019): 43–53. <https://doi.org/10.1234/KALUTEROS.V1I1.1>.
- Aruan, Abel Kristofel. "Menyoal Agapisme Klasik Di Indonesia: Sebuah Dialektika Mengenai Anders Nygren Dan Apropriasi Terhadap Eros Dalam Etika." *Indonesian Journal of Theology* 7, no. 2 (December 30, 2019): 189–206. <https://doi.org/10.46567/IJT.V7I2.145>.
- Bauman, Zygmunt. *Consuming Life*. Leeds: John Wiley & Sons, 2007.
- Bonhoeffer, Dietrich. *Life Together: The Classic Exploration of Christian in Community*. Blue Harvest Publishing, Inc., 2025.
- Budi, Adelia Permata, and Dany Miftahul Ula. "Peran Media Sosial Terhadap Perkembangan Identitas Sosial Generasi Alpha Di Desa Sidodadi Lawang Malang." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (June 2024): 11–22. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3325>.
- David Hunter. "Augustine of Hippo." In *Christian Theological Tradition*, 193–205. London: Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315664590-18>.
- Goffman, Erving. "The Presentation of Self in Everyday Life." In *Social Theory Re-Wired*, 450–59. London: Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003320609-59>.
- Greg Smith. "The Drama of Social Life." In *The Dramaturgical Legacy of Erving Goffman*, 1st Edition., 57–72. London: Routledge, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315615691-6>.
- Halawa, Agnes Monica, and Remegises Danial Yohanis Pandie. "Manusia Baru Bagi Remaja Kristen Berdasarkan Kolose 3:5-17 Dan Implikasinya Bagi Pendidik Kristen." *Edukris: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 01 (January 15, 2025): 16–34. <https://doi.org/10.54793/ek.v1i01.180>.
- Hamilton, Lawrence. *Amartya Sen: Key Contemporary Thinkers*. Cambridge: John Wiley & Sons, 2019.
- Hauerwas, Stanley. *Christian Existence Today: Essays on Church, World, and Living in Between*. Wipf and Stock Publishers, 2010.
- Imbing, Roy, and Remegises Danial Yohanis Pandie. "Application of Shepherd Leadership to the Spiritual Growth of Christian Youth in the Digital Age." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 7, no. 2 (July 31, 2023): 177–87. <https://doi.org/10.46445/ejti.v7i2.668>.
- Nassa, Grace Son. "Trinitas Dalam Pandangan Karl Barth." *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 10, no. 1 (December 26, 2020): 65–82. <https://doi.org/10.51828/td.v10i1.31>.
- Peacock, Mark S. "Starvation and Social Class: Amartya Sen on Markets and Famines." *Review of Political Economy* 22, no. 1 (January 2010): 57–73. <https://doi.org/10.1080/09538250903391988>.
- Purwanto, Edi. "Teologi Pembebasan Palestina." *Manna Rafflesia* 11, no. 1 (2024): 55.
- Rawls, John. "A Theory of Justice." In *Applied Ethics*, 21–29. London: Routledge,

2017. <https://doi.org/10.4324/9781315097176-4>.
- Reinhold Niebuhr. *Man's Nature and His Communities: Essays on the Dynamics and Enigmas of Man's Personal and Social Existence*. New York: Wipf and Stock Publishers, 2012.
- Remegises Danial Yohanis Pandie, Desi Sianipar, and Lamhot Naibaho. "Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Pedagogis Kritis Paulo Freire Dalam Konteks Budaya Suku Boti." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 2 (December 2022): 579–91. <https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.944>.
- Saidah, Fitri Nafiatus, and Abdul Muhid. "Peran Pemberian Psychological Empowerment Terhadap Kepercayaan Atasan Pada Bawahan: Literature Review." *Competence : Journal of Management Studies* 15, no. 2 (November 21, 2021): 162–72. <https://doi.org/10.21107/KOMPETENSI.V15I2.12514>.
- Simon, John Christianto. "Pemikiran Filsafat John Calvin Tentang Manusia Dan Relevansinya Hingga Di Era Pandemi." *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 2, no. 1 (December 3, 2021): 34–59. <https://doi.org/10.52489/JUTEOLOG.V2I1.37>.
- Sirait, Hikman, and Remegises Pandie. "Menjembatani Ilmu Dan Iman: Menelusuri Metode Penelitian Kualitatif Dalam Studi Teologi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.D SE-Full Articles (September 2025).
- Stott, John. *Isu-Isu Global Menentang Kepemimpinan Kristiani*. Jakarta: YKBB/OMF, 2005.
- Susanta, Yohanes Krismantyo, Yeremia Yordani Putra, and Ivan Christian. "Ethics Of Responsibilities According To Emmanuel Levinas And Its Implications For Interfaith Dialogue: Christian Perspectives." *Dialog* Vol 43, no. 2 (2020): 167–76. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.389>.
- Theron, Stephen. "Justice: Legal and Moral Debt in Aquinas." *The Downside Review* 121, no. 424 (July 2003): 157–70. <https://doi.org/10.1177/001258060312142402>.
- Thomas Albert Barlow. "The Movement of the Spirit: A Constructive Comparison of Divine Grace in the Theologies of Paul Tillich and John Wesley." *Electronic Theses and Dissertations*. University Of Denver, 2019. <https://digitalcommons.du.edu/etd/1646>.
- Whidden, David L. "The Theology of Play and the Play of Theology in Thomas Aquinas." *The Thomist: A Speculative Quarterly Review* 80, no. 2 (April 2016): 273–84. <https://doi.org/10.1353/tho.2016.0015>.